



# Setop Program Seragam Gratis

**PONTIANAK** - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menghentikan sementara program pemberian seragam sekolah gratis untuk pelajar kurang

mampu yang telah bergulir sejak beberapa tahun terakhir. Itu karena, perusahaan pemenang pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar itu sem-

pat dipermasalahkan oleh aparat penegak hukum (APH), karena telah beberapa kali memenangkan proyek tersebut.

Hal itu disampaikan Sutarmidji

usai menghadiri kerja sama atau nota kesepakatan (MoU) antara kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan kepolisian, untuk percepatan belanja

pemerintah secara daring, Rabu (25/1). Midji-sapaan karibnya meminta APH tidak mempersoalkan jika ada satu perusahaan yang selalu menang tander di

proyek-proyek pemerintah, selama memang secara prosedur tidak ada yang dilanggar.

◆ Ke Halaman 15 kolom 1



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2023	Hal.: 10																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## Setop Program Seragam Gratis

Sambungan dari halaman 9

Karena selama ini, perusahaan yang demikian, menurutnya, sering dicurigai. Padahal dari sisi kinerja dan mekanismenya perusahaan tersebut sudah baik. "Kalau ada perusahaan yang sama tidak boleh menang (tender) tiap tahun, karyawannya mau makan apa," ungkapnya kepada awak media.

Midji mencontohkan seperti proyek pengadaan seragam sekolah gratis yang dimenangkan oleh salah satu perusahaan konveksi. Karena perusahaan tersebut selalu menang tender setiap tahun, akhirnya dicurigai dan sempat diperiksa.

"Kan yang penting kualitasnya sesuai dengan spesifikasi, harganya sesuai, dan distribusinya benar. Tendernya tidak ada masalah, mau menang 10 tahun berturut-turut pun apa

salahnya. Ini tidak, kadang menang dua tiga tahun mulai dipanggil (APH), ada laporan, padahal (laporan) itu karena persaingan antar-kontraktor (perusahaan)," ujarnya.

Ia tidak setuju jika hal-hal demikian masih sering terjadi. Karena jika memang ada pelanggaran dari kontraktor, seperti korupsi dan penyimpangan lainnya, ia pasti mempersilakan diproses oleh APH. Asal semua berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. "Misalnya (pengadaan) pakaian (seragam), ini kita sampai tunda, pakaian untuk anak sekolah miskin, karena dicurigai yang menang itu-itu saja. Akhirnya saya hentikan dulu, biar saja, dampak-dampaknya terserah, dari pada kita repot-repot diperiksa, hentikan dulu," terangnya.

Hal-hal yang demikian menurutnya sudah tidak rasional. Ia pun sudah mem-

inta Inspektorat melakukan pembenahan terlebih dahulu. "Saya minta cek tahun lalu distribusinya (dari perusahaan pemenang tender) bagus tidak, ternyata bagus. Nanti kalau sudah (audit) BPK, nanti akan distribusikan kurang, ya kita berdasarkan (audit) BPK," tegasnya.

Midji berharap semua pihak menghormati kebijakan yang ada, apalagi kemarin sudah ada nota kesepakatan (MoU) antara Kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepolisian dalam rangka percepatan belanja pemerintah. Dimana hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan presiden saat pertemuan bersama kepala daerah dan Forko-pimda se-Indonesia beberapa waktu lalu.

"Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi ke-mampuan menajaga keamanan sampai terjadi kekhawatiran-

kekhawatiran resesi dan lain sebagainya. Sehingga daerah jangan ragu membelanjakan APBD itu," ajaknya.

Salah satu caranya adalah dengan memberikan peran pengawasan yang lebih besar kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat. Sehingga ketika ada laporan di masyarakat terkait dugaan penyimpangan ke APH, maka harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan APIP. "APIP hendaknya bisa menyelesaikan itu dulu, dalam artian melakukan klarifikasi dan lainnya dalam waktu tertentu, jangan sampai juga terlalu lama," tambahnya.

Untuk itu, Midji juga meminta Inspektorat atau APIP bekerja secara objektif. Penilaian yang dilakukan harus apa adanya, jangan memandang kepala daerah, dan jangan mau diintervensi oleh siapapun.

"Supaya laporan masyarakat yang ke APH itu bisa betul-betul didudukkan pada persoalan yang benar, kalau salah ya salah. Kalau ada kerugian itu yang dibicarakan dengan APH, apakah ini patut diteruskan ke ranah pidana, atau dia mengembalikan (kerugian)," jelasnya.

Karena itu, Midji mengimbau kepada perangkat daerah agar tidak takut dalam mengeksekusi anggaran. Jika ditemui hambatan-hambatan, termasuk untuk pemerintah kabupaten/kota, agar selalu berkoordinasi dengan APH di daerah masing-masing. "Kalau tidak (bisa juga) lapor ke atas, lapor ke gubernur, nanti saya koordinasi dengan Pak Kajati, Pak Kapolda, tapi saya rasa tidak ada alasan untuk

takut mengeksekusi anggaran," ucapnya.

Ia berharap laporan apapun yang masuk dan diproses APH harus berdasarkan audit. Karena pengalaman selama ini, menurutnya, dalam suatu proyek misalnya, laporan muncul justru dari sesama pekerja, karena persaingan atau kalah dalam tender.

Dengan adanya MoU lembaga-lembaga penegak hukum itu, Midji berharap APIP benar-benar bisa berperan. Jangan sampai penegakan aturan hanya berdasarkan asumsi-asumsi. Maka dari itu laporan awal harus memenuhi syarat minimal memiliki dua alat bukti yang cukup. "Jangan hari ini laporan, hari ini terbit surat perintah penyelidikan, yang

dipinta data, minta data sama kita (pemda) berartikan belum ada alat bukti. Itu tidak betul," imbuhnya.

Orang nomor satu di Kalbar itu mendukung penguatan pendampingan. Dalam hal ini, APIP yang selalu berkoordinasi dengan APH. Masyarakat juga kata dia, bisa ikut sama-sama melakukan pengawasan.

"Jadi tindak lanjut dari sana (pusat), saya akan koordinasi dengan Pak Kajati, Pak Kapolda, supaya apa, seperti yang disampaikan Presiden, banyak negara yang sudah terjadi resesi, inflasi tinggi dan sebagainya. Kita harus jaga jangan sampai Indonesia, Kalbar mengalami itu, menjaga itu, belanja pemerintah eksekusi betul," pungkasnya. (**bar**)